

SKRIPSI MINOR

**PROSEDUR PENYALURAN DANA KREDIT USAHA
RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT GUNUNG RAYA KANDIS**

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-tugas
Akademik dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd)*



Oleh

FITRIYANTI
01074203416

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIMRIAUI
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

PROSEDUR PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT GUNUNG RAYA KANDIS

Oleh : FITRIYANTI

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Gunung Raya yang berlokasi di Jalan Pekanbaru – Duri Km. 72, Kelurahan Telaga Sam - Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau. Penelitian ini berfokus kepada prosedur yang diterapkan perusahaan tersebut khususnya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun yang menjadi perumusan masalahnya adalah apakah prosedur penyaluran dana kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis telah efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis telah efektif. Dan bagaimanakah langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis dalam menangani Kredit Macet. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan prosedur penyaluran dana kredit usaha rakyat agar lebih baik lagi kedepannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu membahas data-data yang informasinya diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang ada.

Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis setiap tahunnya mengalami peningkatan serta prosedur pemberian kreditnya telah efektif dan sesuai dengan teori dan standar Bank Indonesia, kemudian langkah-langkah yang diambil oleh BRI Unit Gunung Raya Kandis dalam menangani kredit macet juga sesuai dengan teori yang ada.

Kata kunci : prosedur penyaluran kredit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatNya sehingga semangat menggali ilmu pengetahuan tidak pernah padam dan berkat ridhaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Rosulullah SAW yang telah membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.

Merupakan suatu ketenangan dan kebahagiaan bagi penulis, ketika penulis mampu mencurahkan segenap tenaga, kemampuan dan dana untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon kepada Allah SWT semoga hasil karya tulis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan dunia pendidikan serta dunia perusahaan khususnya.

Dengan izin dan Rahmat Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“PROSEDUR PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT GUNUNG RAYA KANDIS”**, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami hambatan dan rintangan, tetapi dengan adanya bantuan dan dukungan baik moril

maupun materil yang penulis terima dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir Karim, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M, Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si, Bapak Alfizar. M.si, dan Bapak Drs. H.Zamharil Yahya, MM, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Andri Novius, SE, M.si. Ak selaku Ketua jurusan Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Jasmina Syafei, SE, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, dan juga selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu motivasi dan dorongan selama penulis menuntut ilmu dibangku kuliah.

7. Bapak Pimpinan L.A Butar Butar beserta karyawan-karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan Data yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
8. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Ramli dan Ibunda tercinta Jusmini yang telah memberikan segalanya baik materi, kasih sayang, motivasi, dukungan dan do'a yang terus menerus sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan di UIN SUSKA RIAU ini.
9. Buat abang-abangku (Yusmar, Sumardi, dan Mahyudin), adikku (Rohani), serta buat kakak ipar dan keponakan (Asi Rianti dan Wella yusdensi) yang telah memberiku semangat, semoga kita tetap tumbuh menjadi anak-anak membanggakan.
10. Buat sahabatku, Melisa Kurniati dan Teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Serta buat pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mendo'akan semoga kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan terhindar dari dosa, Amin ya robbal alamin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun jika ditemui kesalahan dan kekurangan, sehubungan dengan hal tersebut, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, sehingga menjadikan skripsi ini lebih bermutu.

pekanbaru, Oktober 2013

Penulis

FITRIYANTI
NIM. 01074203416

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia	13
B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia.....	15
C. Struktur Organisasi BRI Unit Gunung Raya.....	16
D. Deskripsi Jabatan	17
E. Kegiatan Bank Rakyat Indonesia.....	19

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Bank	22
2. Pengertian Kredit	24

3. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)	26
4. Unsur-unsur Kredit.....	27
5. Tujuan dan Fungsi Kredit	31
6. Jenis-jenis Kredit.....	33
7. Jaminan Kredit	37
8. Faktor-faktor Penentu dalam Pemberian Kredit	39
9. Prosedur Penyaluran Kredit	42
10. Kredit Bermasalah/ Macet.....	45
11. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Bermasalah/ Macet	47
12. Kredit Ditinjau dalam Hukum Islam.....	50
B. Tinjauan Praktek	
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	52
2. Persyaratan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	54
3. Prosedur Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis...	56
4. Penyebab Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis.....	62
5. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis dalam Menangani Kredit Bermasalah (Macet)	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan topik yang paling banyak di bicarakan diberbagai forum baik Nasional maupun Internasional sebab tolak ukur kemajuan dari suatu Negara adalah kemajuan ekonominya. Banyak perusahaan bergerak dalam dunia bisnis mulai dari pengusaha kecil, pertanian, industri, perumahan, keuangan dan usaha lainnya. Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun tidak pernah lepas dari masalah modal untuk membiayai usahanya baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan Giro, tabungan dan Deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan dalam menyalurkan dananya hendaklah tetap berorientasi pada faktor – faktor pertumbuhan, maksud disini adalah diarahkan pada sektor –sektor yang produktif yang dapat membawa dampak ganda, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, pertambahan lapangan usaha penduduk maupun pertambahan devisa. Selain itu perbankan juga mempunyai peranan yang sangat penting dan aktif dalam memperlancar transaksi perdagangan baik ditingkat nasional maupun internasional.

Penerimaan utama dari Bank diharapkan dari penyaluran kredit, mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaan tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relative tinggi dari pada aktiva lainnya.

Perkreditan bukanlah masalah yang asing baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kredit selain mempunyai fungsi dalam membantu

masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur (nasabah), ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena semuanya penuh dengan resiko bagi pihak lembaga kredit.

Mengingat bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra itu sendiri harus baik, dalam menjaga image (kesan) baik bagi masyarakat terutama nama baik itu sendiri.

Pengembangan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif untuk pengoptimalan perbankan bagi pengembangan dan peningkatan kredit tersebut. Mengingat kredit yang diberikan bank kepada usaha rakyat

merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membantu program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah.

Segmen perbankan komersial BRI difokuskan pada layanan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Untuk usaha kecil dan menengah, rentang plafond kredit dibatasi dibawah Rp. 20 Juta, sedangkan untuk usaha menengah keatas diberikan plafond kredit hingga Rp. 100 Juta. Pinjaman untuk sektor usaha kecil dan menengah dilayani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga terdapat di setiap unit kerja BRI di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis memberikan fasilitas pelayanan

kredit, yakni Kredit Modal Kerja, Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Multi Guna, Kredit Investasi, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap, dan lain-lain. Selain itu Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis juga memiliki produk Tabungan, Deposito, Giro, ataupun fasilitas layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu kegiatan Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis adalah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada usaha mikro kecil menengah. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafon* kredit sampai dengan Rp. 500 juta (total eksposur) dan dijamin oleh perusahaan penjamin.

Dalam pemberian kredit (penyaluran kredit) kepada penerima kredit (debitur) atau dalam hal ini adalah nasabah, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis selaku kreditur harus benar-benar menganalisa debitur baik secara intern maupun secara ekstern agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dengan proses yang sangat mudah, untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta meminimalisir resiko kredit, didalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu kredit. Jumlah permintaan kredit yang diterima bank seringkali tidak sedikit. Oleh karena itu untuk menghemat waktu, petugas bank memberikan syarat-syarat yang dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan.

Untuk calon debitur Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus mencantumkan lampiran yang diperlukan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan usaha, bagi usaha baru minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan, kemudian agunan pokok hanya berupa proyek/usaha yang dibiayai dan agunan tambahan seperti tanah atau bangunan tidak wajib dipenuhi.

Sistem dan prosedur kredit pada BRI Unit Gunung Raya Kandis untuk calon debitur dapat mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat secara tertulis kepada Kantor Cabang BRI atau Kantor Cabang Pembantu. Kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pengajuan permohonan KUR yang telah disediakan oleh pihak bank dan calon debitur melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian berkas permohonan kredit tersebut diserahkan ke bagian Kredit untuk melakukan tahap analisis kredit/tahap pemeriksaan. Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan peninjauan langsung kelapangan. Sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Gunung Raya Kandis wajib meneliti dokumen yang berkaitan pada pemberian putusan kredit, apakah kredit yang diajukan disetujui atau ditolak. Jika kredit yang diajukan disetujui, maka akan dilakukan tahap pencairan kredit/akad kredit.

Prosedur pemberian kredit yang sehat dan benar adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan analisis pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengeluarkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan.

Dalam pemberian kredit, pasti ada kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan, tentu pihak manajemen bank perlu melakukan sistem pemberian kredit yang benar-benar efektif kepada nasabahnya.

Pada masa krisis keuangan global sekarang ini banyak usaha baik bank maupun perusahaan-perusahaan yang mengalami kepailitan atau dilikuidasi. Hal ini dipengaruhi banyak hutang dari bank-bank dan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Namun hal ini tidak terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis di sebabkan oleh :

1. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis tetap menjaga eksistensinya dan tetap menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).
2. Mempunyai letak yang strategis.
3. Tetap mempertahankan *image* yang baik pada nasabah.
4. Menanamkan tingkat kepercayaan dalam menjaga stabilitas perusahaan.

Aliran kredit merupakan faktor yang sangat menjadi perhatian bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis maka perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kredit kepada sektor-sektor usaha yang produktif untuk skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta selalu menjaga hubungan yang harmonis antara nasabah dengan Bank dalam rangka menghindari terjadinya kredit macet.

Berikut ini adalah data tentang jumlah target dan realisasi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya di Kandis tahun 2009 s/d 2012 dapat dilihat pada table 1.1 berikut :

Tabel.1.1 : Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya.

1.1 Rp. (Juta)			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2009	800	840	105 %
2010	1.800	2.000	111 %
2011	2.300	3.050	132 %
2012	4.000	5.700	157 %

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk unit Gunung Raya Kandis

Dari Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis mengalami peningkatan dari tahun ketahun dari target yang ditentukan. Mengindikasikan bahwa banyaknya nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana kredit usaha rakyat.

Dengan adanya latar belakang yang telah terpaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kredit Usaha Rakyat pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis, dan menuangkannya dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul ”**PROSEDUR PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA UNIT GUNUNG RAYA KANDIS**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yaitu “Apakah prosedur penyaluran dana kredit

usaha rakyat pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kecamatan Kandis Cabang Duri telah efektif ?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah prosedur pemberian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kecamatan Kandis Cabang Duri telah efektif.
- b. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kecamatan Kandis Cabang Duri dalam menangani kredit yang bermasalah (macet).

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan masukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kecamatan Kandis Cabang Duri.
- b. Sebagai wadah bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan.
- c. Sebagai bahan pedoman atau referensi lebih lanjut bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada perusahaan tersebut.
- d. Merupakan syarat untuk menyelesaikan studi program Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN SUSKA Riau.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Gunung Raya yang berlokasi di Jalan Pekanbaru – Duri Km. 72, Kelurahan Telaga Sam - Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau dan waktu penelitian dilakukan tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang berkenaan langsung dengan masalah yang dirumuskan diatas (**Nazir,2005:50**).

b. Data Sekunder

Adalah data pendukung untuk memperkuat data primer (**Nazir,2005:50**).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek

pelaporan untuk mendapat gambaran secara langsung tentang kegiatan-kegiatan yang akan di laporkan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara dengan karyawan dan pihak manajemen PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya di kandis yang diberikan langsung dengan penulis ini.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang ada pada objek pelaporan serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang disajikan perusahaan.

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu menggambarkan situasi, kondisi dengan jalan membahas data-data yang informasinya diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman agar lebih terarah dalam penulisan masalah secara terperinci, maka penulis membagi menjadi empat bab, dimana masing – masing bab berisikan :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, Analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini berisikan tentang sejarah singkat berdirinya PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis, Visi dan Misi BRI,Struktur Organisasi, Deskripsi Jabatan, dan Kegiatan Bank.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Dalam bab ini menguraikan tentang tujuan teoritis dalam laporan penelitian yaitu pengertian bank, pengertian kredit, pengertian UMKMK, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, faktor-faktor penentu dalam pemberian kredit, prosedur penyaluran kredit, kredit bermasalah/macet, penyelesaian dan penyelamatan kredit macet, kredit ditinjau dalam hukum islam, pengertian KUR, prosedur penyaluran kredit usaha rakyat pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis, dan langkah-langkah yang diambil oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis dalam menangani kredit bermasalah/ macet.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini merupakan bab penutup dimana akan dikemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/ pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri tanggal 16 Desember 1895.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan

Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Indonesia unit II bidang ekspor impor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Bank BRI sudah berdiri sejak lama dan tahu mengenai masalah perbankan di Indonesia, dan yang merupakan Bank milik negara dan Bank BRI bukan Bank Sentral Indonesia. Sebagian besar Bank di Indonesia, Bank BRI lah yang mempunyai Unit Kerja atau Cabang terbanyak di Negara ini. Karena Bank BRI selalu peduli terhadap rakyat miskin yang masih banyak tinggal di Daerah Pedesaan dan tak mengutamakan orang kaya saja. Dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak membedakan – bedakan mana orang kaya dan mana orang miskin, semuanya di mata Bank BRI sama saja.

Di setiap pelosok Negara ini, semua cabang Bank BRI selalu memberikan simpan–pinjam kepada para nasabah yang selalu membutuhkan dana untuk keperluan nasabahnya.

B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

1) Visi

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah semua para nasabah yang ada diseluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank terbaik di Indonesia ini.

2) Misi

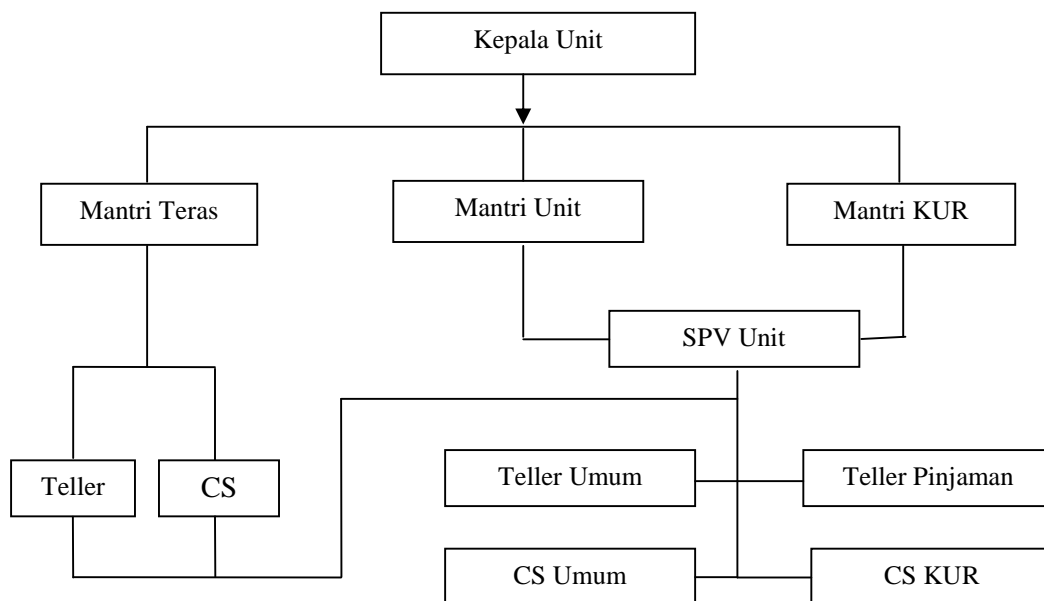
- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*,
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang seoptimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Struktur Organisasi BRI Unit Gunung Raya

Struktur organisasi formal pasti memiliki struktur organisasi merupakan suatu wadah atau fungsi dalam manajemen yang menetapkan dan membagi tugas pekerjaan yang dilakukan antara unsur-unsur organisasi. Sehingga memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

Dengan adanya organisasi, manajemen dapat mengadakan kegiatan yang diciptakan dari suatu susunan organisasi sehingga secara formal dimana setiap pejabat dari fungsi-fungsi dalam organisasi dapat melaksanakan fungsi sebagai wadah serta alat untuk mewujudkan tujuan yang dialami dan telah disetujui bersama.

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Duri Unit Gunung raya Kandis.



Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Duri Unit Gunung Raya Kandis.

D. Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis yang disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Intinya menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing personil pada setiap bidang yang ditempati. Tugas masing – masing personil anantara lain :

1. Kepala BRI Unit

Melaksanakan fungsi manajemen di BRI Unit dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kinerja bisnis mikro dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai RKA dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro.

Tugas :

- a) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Unit diwilayah kerjanya untuk mencapai target.
- b) Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang :

- a) Memutus permintaan KUR, Kapedes, dan BRInet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- b) Memutus /memfiat biaya promosi.
- c) Memfiat pencairan/ penarikan simpanan.
- d) Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus.

2. Mantri

Tugas :

- a) Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya).
- b) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- c) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Wewenang :

- a) Memprakarsai permintaan pinjaman
- b) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.

3. Asisten Mantri KUR

Tugas :

- a) Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran dan penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
- b) Melaksanakan aktivitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah.

4. Customer Service

Tugas :

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI.

- b. Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit.
- c. Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

5. Teller

Tugas :

- a) Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun over booking, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional BRI.
- b) Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.
- c) Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- d) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.

E. Kegiatan Bank Rakyat Indonesia

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis

simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

- a. Simpanan Giro (Demand Deposit),
- b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit),
- c. Simpanan Deposito (Time Deposit),

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

- a. Kredit Investasi,
- b. Kredit Modal Kerja,
- c. Kredit Perdagangan
- d. Kredit Produktif,
- e. Kredit Konsumtif,

3. Memberikan Jasa- Jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi

keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

- a. Kiriman Uang (Transfer)
- b. Kliring (Clearing)
- c. Safe Deposit Box
- d. Bank Notes
- e. Letter of Credit (L/C)
- f. Cek Wisata (Travellers Cheque)
- g. Menerima setoran-setoran.
- h. Melayani pembayaran-pembayaran.
- i. ATM, dll.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan Bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di negara–negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Kata bank berasal dari bahasa Italia *Banco*, artinya meja yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pasar. Pada dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi kredit , dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Peranan bank ini semakin berkembang dan bidang usahanya pun semakin luas. Sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian internasional.

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. **(Ismail : 2009 : 12)**

Berdasarkan pendapat penulis sendiri Bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat dengan tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, untuk melakukan investasi, dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran.
- b) Menyalurkan dana ke masyarakat maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak agar bank terhindar dari akibat

tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab.

- c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, dan lain-lainnya.

2. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*). Oleh karena dasar kata kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Kredit juga merupakan kemampuan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang, atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.

Hermansyah (2008:57), dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Nasional Indonesia, memberikan pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pada dasarnya kredit adalah sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada pelaku ekonomi yang menunjang pembangunan yang dilaksanakan dan guna ikut mensukseskan program pemerintah. Pembangunan yang dilakukan dapat berwujud pembangunan disektor pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

Menurut **Rivai Veithzal (2006:4)**, menjelaskan kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah/pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut **Suyatno (2007:12)** kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang.

Menurut **Muslehuddin (2004:32)** kredit merupakan suatu kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar, kepercayaan ini berdasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi, adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai janji untuk membayar hutang atau sesuai izin untuk menggunakan modal orang lain. Dan ia mengacu pada upaya seseorang untuk menggunakan barang dagangan seseorang, dengan janji akan membayarnya kembali setelah barang dagang itu laku.

Walaupun pengertian kredit berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama. Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman barang, uang atau jasa antara pemberi pinjaman atau bank (kreditur) dengan penerima pinjaman atau nasabah (debitur) atas dasar kepercayaan dan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dengan debitur, dan dikembalikan pada jangka waktu atau tanggal yang telah disepakati antara keduanya.

3. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)

a. Usaha Mikro

Yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki criteria usaha mikro sebagai b:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil

Adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerjaan juga kecil (**Sukirno 2004:365**).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki criteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima tarus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria sbb:

- 3) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 4) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

d. Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992, Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

4. Unsur – unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut **(Kasmir : 2003 : 49)** adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterima kembali dimasa tertentu atau yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Unsur kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing. Kesepakatan penyaluran kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga

merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

6. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya demikian pula jika sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

Resiko yang mungkin terjadi dalam perkreditan adalah :

a) Resiko Moral (Moral Risk)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber, ternyata penerima kredit mempunyai moral yang baik, akan tetapi selama dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi ternyata berbagai faktor terjadi perubahan moral dari peminjam sehingga masih terdapat kemungkinan kredit tersebut tidak dapat diterima kembali oleh kreditur.

b) Resiko Keuangan (Financial Risk)

Sebelum dan pada saat kredit diterima, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bahwa si penerima kredit mempunyai posisi keuangan yang baik, tetapi ternyata pada saat kredit berjalan dan kredit

harus dilunasi terjadi perubahan posisi keuangan dari peminjam, sehingga debitur kemungkinan tidak akan melunasinya.

c) Resiko Bisnis (Business Risk)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan, informasi dan data yang diperoleh ternyata perekonomian secara makro dan mikro menunjukkan bahwa penerima kredit mempunyai perkembangan usaha yang baik. Akan tetapi setelah kredit berjalan dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi terjadi kelesuan perekonomian secara makro dan mikro sehingga usahanya mengalami penurunan yang menyebabkan peminjam kredit tersebut tidak dapat melunasi kewajibannya.

Menurut **Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:3)**, Unsur-unsur kredit yaitu :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang atau jasa.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur saat membayar kembali dari debitur.
6. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

1. Tujuan dan Fungsi Kredit

1) Tujuan Pemberian Kredit

a) Mencari Keuntungan

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit berupa keuntungan yang diraih oleh bank dalam bentuk bunga yang harus dibayar oleh nasabah sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah.

b) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c) Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Menurut **Melayu SP. Hasibuan (2005:88)** tujuan utama dari pemberian kredit adalah :

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana – dana yang ada
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat

- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan keuntungan bagi pemerintah dengan adanya pemberian kredit adalah:

- a) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk – produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa Negara
- d) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.
- e) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

2) Fungsi Pemberian Kredit

Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa – jasa dan bahkan konsumsi yang semua itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut **Melayu S.P Hasibuan (2005:88)**, fungsi pemberian kredit sebagai berikut :

- a) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d) Meningkatkan hubungan internasional.
- e) Meningkatkan produktifitas dana yang ada.
- f) Meningkatkan daya guna barang.
- g) Meningkatkan kegairahan usaha masyarakat.
- h) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i) Meningkatkan *income per capital* masyarakat.
- j) Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

2. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kredit. Dalam prakteknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis. Pembagian jenis ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Adapun jenis atau macam kredit yang sering kita temukan dewasa ini menurut **Kasmir (2006:76)** jenis-jenis kredit adalah :

- 1) Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha baru.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

c. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarga.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dihasilkan. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu yang baik berupa barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

d. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3) Jenis kredit berdasarkan jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selamalamanya 1 tahun (kurang dari 1 tahun).
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.

4) Dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan,

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

- b. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5) Dilihat dari Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit Pertanian

merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit industri

yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil, menengah, besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis kredit ini untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

3. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan ini adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga Si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambarnya.

Dalam prakteknya, yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh nasabah calon debitur adalah sebagai berikut:

1) Jaminan dengan barang-barang seperti:

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin-mesin atau peralatan
- e. Barang dagangan

f. Tanaman/ kebun/ sawah

g. Dan lainnya

2) Jaminan surat berharga seperti:

a. Sertifikat saham

b. Sertifikat obligasi

c. Sertifikat tanah

d. Sertifikat deposito

e. Rekening tabungan yang dibekukan

f. Promes

g. Wesel

h. Dan surat berharga lainnya.

3) Jaminan Orang atau Perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

4) Jaminan Asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

4. Faktor-Faktor Penentu Dalam Pemberian Kredit

Pinjaman usaha kecil lebih kompleks karena bank seringkali diminta mengambil resiko kredit. Dalam pemberian kredit membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha debitur.

Adapun prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C menurut (Kasmir:2004:91) sebagai berikut :

a. Character

Sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggung jawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermi dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. Capacity

Kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.

c. Capital

Kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.

d. *Collateral*

Kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/anggunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.

e. *Condition*

Faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia (peminjam) jalankan.

Sementara itu menurut **Melayu S.P Hasibuan (2005:107)** disamping dasar-dasar teknis yang dikenal dengan 5C ada pula pedoman penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping menggunakan 5C dan 7P, dalam penilaian suatu kredit guna menilai layak atau tidak untuk diberikan kredit dapat dilakukan juga dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu **(Siamat : 2004 :107-110) :**

a. Aspek yuridis/hukum

Aspek ini menyangkut masalah legalitas badan usaha serta ijin-ijin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

b. Aspek pemasaran

Aspek ini menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, kualitas produksi.

c. Aspek keuangan

Aspek ini menyangkut sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

d. Aspek teknis/operasi

Aspek ini menyangkut kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, lokasi, layout ruangan.

e. Aspek manajemen

Aspek ini menyangkut struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

f. Aspek sosial ekonomi

Aspek sosial ekonomi menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.

5. Prosedur Penyaluran Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Menurut bank Indonesia pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dan bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan bank Indonesia.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang kepada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk didalam pemberian kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan Bank bagi bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan

Agar pemberi kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan pengkreditan bank dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan

komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
5. Pengawasan kredit;
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolah perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

- b. Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia
 1. Mengisi formulir aplikasi kredit
 2. Melengkapi persyaratan
 3. Data historis perusahaan
 4. Data proyeksi
 5. Data jaminan
 6. Mengecek apakah formulir permohonan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap
 7. Penyerahan dokumen ke bank
 8. Konfirmasi data/ dokumen
 9. Analisa kelayakan kredit dengan menggunakan 5C

10. Analisis keuangan

11. Persetujuan kredit

10. Kredit Bermasalah/ Macet

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.” Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan konsisten. Kebijaksanaan perkreditan harus sudah diterapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 januari 1996. Bagi Bank yang telah mempunyai pedoman tersebut dengan memperhatikan semua aspek-aspek tersebut di atas. Sedangkan bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sejak memulai melakukan kegiatan usahanya.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank memberikan kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkannya, maka Bank

Indonesia akan memberikan sanksi yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut wajib dibuat mengingat bahwa sesuai dengan pengertian kredit, maka lingkup pemberian kredit mencakup banyak aspek dan mengandung resiko yang bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Berhubungan dengan kredit bermasalah ada beberapa golongan kredit yang dianggap bermasalah, yaitu:

a. Kurang lancar

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga melampaui 90 hari, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

b. Diragukan

Merupakan suatu kredit yang kurang lancar, kredit ini masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari pokok pinjaman debitur atau kredit yg tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari pokok pinjamannya.

c. Macet

Dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 3 sampai 6 bulan, terdapat tunggakan bunga pinjaman 1 sampai 6 bulan, tidak ada tanda-tanda pelunasan atau penyelamatan terhadap kredit oleh debitur.

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisa setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu :

a) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

b) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu unsur kesengajaan, dan adanya unsur tidak sengaja.

11. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit diragukan dan macet. Jika bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan, tentu saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur.

Menurut (**Kasmir:2006:129**) tindakan yang dapat diambil oleh bank untuk penyelamatan kredit macet adalah sebagai berikut :

a. *Rescheduling*

ialah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit, sehingga keringanan yang diberikan adalah :

1) Memperpanjang jangka waktu kredit.

- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning*

Adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- 3) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/ laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- 4) Pembebanan bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break even*). Pembebanan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.

c. *Restructuring*

Adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak, tindakan ini meliputi :

1. Dengan menambah jumlah kredit. Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.
2. Dengan menambah equity. Apabila tambahan modal sendiri yang berupa:
 - a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara penambahan/ penyetoran uang, dan konversi uang nasabah, baik uang bunga, uang pokok, atau keduanya.
 - b) Tambahan dari pemilik, kalau perusahaannya adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham.

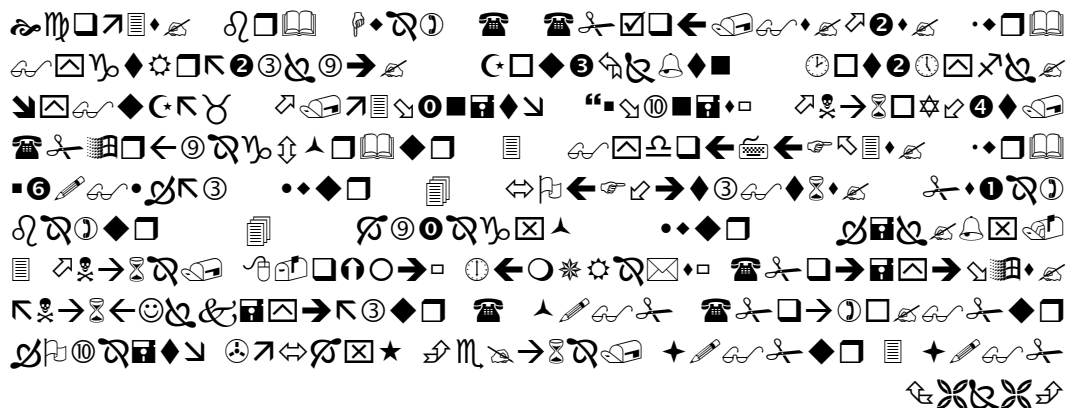
d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis penyelamatan diatas, seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutangnya.

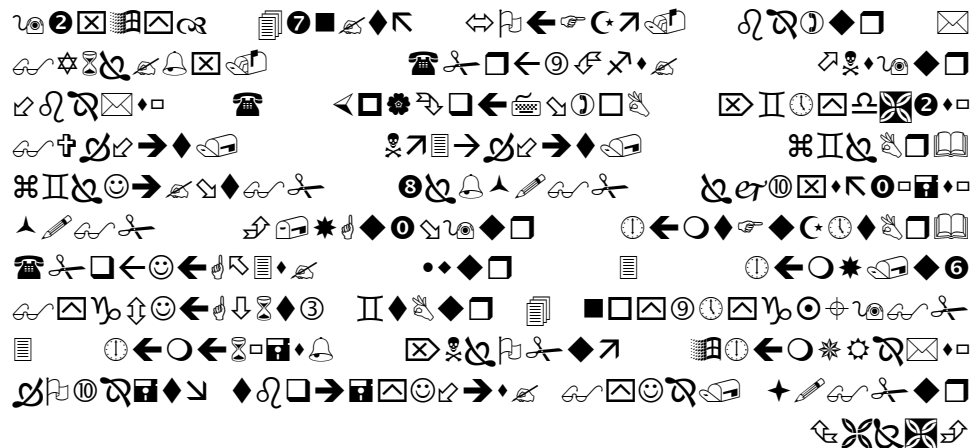
𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

2. Bila diperlukan, dalam perjanjian hutang dapat disertakan

barang jaminan, Al-Baqarah ayat 283:



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

B. TINJAUAN PRAKTEK

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebelum penulis membahas tentang prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis, penulis akan memaparkan pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit modal kerja atau kredit investasi pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dibidang usaha produktif dan layak namun

belum *bankable* dengan *plafon* kredit sampai dengan Rp. 500 juta dan dijamin oleh perusahaan penjamin.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKMK dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif “.

UMKMK harus merupakan usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum bankable. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKMK pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKMK antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

Penggolongan KUR Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

- a. KUR s/d Rp 500 juta
- b. KUR (Mikro) s/d Rp 5 juta
- c. KUR *Lingkage Program*

Berkaitan dengan banyaknya pertanyaan mengenai prosedur dan ketentuan Suplesi untuk KUR Mikro, maka dapat dijelaskan bahwa Sesuai ketentuan yang tercantum pada SE Direksi Nose.S.09-DIR/ADK/03/2010 Tanggal 18 Maret 2010, telah ditetapkan bahwa kepada debitur KUR Mikro dapat diberikan suplesi dengan ketentuan “total eksposur pinjaman maksimal Rp.5 juta”. Namun demikian, mengingat bahwa saat ini maksimal plafond Kredi Usaha Rakyat (KUR) Mikro telah menjadi Rp. 20.000.000 sesuai ketentuan yang diatur melalui Nofacs Kanpus BRI No.B.146-MKR/KPM/10/2010 tanggal 15 Oktober 2010, maka Suplesi KUR Mikro dapat diberikan dengan total eksposur menjadi maksimal Rp. 20.000.000.

2. Persyaratan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

persyaratan Calon Debitur berupa UMKM :

- 1) Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dari hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.

- 2) Tidak sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya).
 - 3) Dalam hal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih memiliki baki debit yang tercatat dalam SIDBI tetapi yang bersangkutan telah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas atau roya dengan lampiran catatan rekening Koran dari bank pemberi kredit atau pembiayaan sebelumnya.
- a. Persyaratan Calon Debitur yang berupa Lembaga *Linkage* :
- 1) Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang kredit atau pembiayaan dari perbankan.
 - 2) Lembaga *linkage* tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah.
- b. Persyaratan Lembaga Keuangan Mikro :
- 1) Telah memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang.
 - 2) Telah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 bulan.
 - 3) Memiliki pengurus aktif.
 - 4) Memiliki AD atau ART.
 - 5) Mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai.
 - 6) Tidak memiliki tunggakan kredit, baik di BRI maupun di lembaga keuangan lainnya.
- c. Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam :

- 1) Telah memiliki izin pendirian kegiatan usaha simpan pinjam dari instansi yang berwenang.
- 2) Telah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara efektif minimal 6 bulan.
- 3) Memiliki pengurus yang aktif.
- 4) Mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai.
- 5) Tidak memiliki tunggakan kredit baik di BRI maupun di bank lainnya.

d. Legalitas Calon Debitur :

- 1) Individu : Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Kepala Desa setempat dan Akte Notaris.
- 3) Koperasi : Anggaran dasar beserta perubahannya.
- 4) Badan usaha lainnya : Akte pendirian beserta perubahannya.

e. Perizinan Calon Debitur :

Untuk kredit dari plafon sampai dengan Rp. 100 juta, izin usaha seperti TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan surat keterangan izin usaha dari Lurah atau Kepala Desa setempat. Sedangkan kredit dengan plafon diatas Rp. 100 juta, calon debitur wajib memiliki izin usaha seperti TDP, SITU, dan SIUP.

3. Prosedur Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis.

Adapun prosedur pemberian dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis untuk calon debitur sebagai berikut:

- 1) Nasabah mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.
- 2) Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah :
 - a. Bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - c. Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).
 - d. Foto Suami dan Istri 3 x 4 masing-masing 1 lembar.
 - e. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/ Lurah setempat.
- 3) Setelah semua berkas persyaratan kredit diterima, pihak bank melakukan wawancara langsung dengan debitur.
- 4) kemudian akan dilakukan tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan yang diperiksa oleh Mantri (*account officer*). BRI Unit Gunung Raya Kandis dalam

melakukan analisis kredit mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

- 5) Penggunaan SID Bank Indonesia (BI *Checking*). Khusus untuk KUR Mikro, pengecekan SID yang semula diwajibkan dirubah menjadi tidak diwajibkan. Namun demikian diharapkan BRI Unit Gunung Raya Kandis tetap melakukan pengecekan SID ke Bank Indonesia sepanjang tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
- 6) Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Gunung Raya dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan (*on the spot*) tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain :
 - a. Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
 - b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
 - c. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.
- 7) Hasil survey dirapatkan oleh Mantri (*account officer*) dan Kepala Unit BRI Unit Gunung Raya Kandis.

8) Tahap pemberian putusan kredit.

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Gunung Raya akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Pada BRI Unit Gunung Raya Cabang Duri, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Gunung Raya wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C's *principlesi*) serta independent.
- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

9) Tahap pencairan kredit/ Akad kredit.

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Gunung Raya.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

1. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
2. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang, Mengisi kuitansi pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

b) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat,

Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *CS* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

c) Fiat Bayar

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

d) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Kebijakan dari BRI Unit Gunung Raya, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BRI Unit Gunung Raya tidak turut serta menyertakan koperasi, karena sampai saat ini BRI Unit Gunung Raya Cabang Duri belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, adapun peminjaman kredit untuk plafon kredit dibawah Rp 50.000.000,- jangka waktunya 3 tahun, dengan bunga 1.6%, sedangkan untuk plafon diatas Rp 50.000.000,- jangka waktunya 5 tahun dengan bunga 1%. Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, Bank Rakyat Indonesia Unit hanya memberikan kredit maksimal Rp 100.000.000,-.

4. Penyebab Kredit Bermasalah pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis

Resiko kredit adalah kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembali, dan pinjaman pokok yang dalam pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis terdapat kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet yang merupakan kredit bermasalah yang dihadapi perusahaan dan kemungkinan tertagih kredit sangat kecil, oleh karena itu pihak bank harus mengupayakan agar tidak mengalami kerugian.

Penyebab kredit macet yang berasal dari pihak bank, dengan melihat permasalahan yang jelas bahwa ada beberapa komponen sistem pengendalian intern seperti pengawasan, informasi dan komunikasi juga dalam komponen lingkungan pengendalian harus diperhatikan tentang peningkatan karyawan seperti diadakan pelatihan atau pendidikan, dan juga perlu diperhatikan tentang pemisahan fungsi yang memadai, sehingga setiap karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis yang disebabkan oleh debitur adalah :

- a) Debitur menyalah gunakan kredit yang telah diberikan.
- b) Debitur kurang mampu dalam mengelolah kegiatan usaha yang ditunjang dengan kredit yang diberikan oleh bank.
- c) Terdapat pula debitur yang tidak beriktikad baik terhadap kredit yang telah diberikan oleh bank.
- d) Karena bencana alam, gagal panen bagi petani.

Sebelum kredit disalurkan pihak bank lebih menitik beratkan pada penganalisa kredit dengan sebaik-baiknya dan setelah kredit diberikan peranan bank tidak lepas begitu saja pemantauan dan pengawasan terhadap pengguna kredit lebih ditingkatkan agar gejala awal terjadinya kredit macet dapat diatasi.

5. Langkah-langkah yang diambil oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis dalam menangani kredit bermasalah (macet)

Apabila sampai terjadi kredit bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternative lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan. Penyelamatan kredit bermasalah tersebut yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Unit Gunung Raya Kandis antara lain :

1. Melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggaknya dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga.
2. Nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kreditnya dikenakan denda 0,75% dari tunggakan perbulan bagi peminjaman diatas 50 juta.

3. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

yaitu dengan cara :

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya, dari 42 kali menjadi 84 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

4. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
 - b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasa.
 - c) Penurunan suku bunga yaitu agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan.
 - d) Pembebasan bunga yaitu pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah yang tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.
5. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai etika tidak baik atau sudah tidak mampu lagi membayar semua hutangnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Sumber Dana Penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari DANA BANK PELAKSANA yang dihimpun dari dana-dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito).
2. KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable kepada Bank Pelaksana. KUR bertujuan untuk tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Prosedur dalam pelaksanaan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis, dirasakan tidak terlalu sulit oleh pihak calon debitur, karena pengajuan kredit tersebut dilakukan dengan cara calon debitur mengajukan permohonan perjanjian

kredit dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Kemudian pihak bank melakukan wawancara pada saat debitur mengantarkan berkas permohonan. Setelah itu pihak bank melakukan peninjauan langsung kelapangan untuk memastikan layak atau tidaknya calon debitur diberikan pinjaman kredit. Hasil survey dirapatkan oleh Mantri dan Kepala Unit BRI. Kemudian Kepala Unit akan memberikan keputusan kredit apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Jika dsetujui maka akan dilakukan pencairan kredit.

4. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis dalam menangani kredit bermasalah yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga, nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kreditnya dikenakan denda 0.75% dari tunggakan perbulan bagi peminjaman diatas 50 juta, penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penyitaan jaminan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir dari skripsi minor ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penyaluran kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pemberian dana Kredit Usaha Rakyat pada masa yang akan datang, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis harus mampu menyusun suatu perencanaan yang lebih baik lagi supaya perkembangan kredit dapat lebih ditingkatkan lagi.
2. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan dimasa yang akan datang kepada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya kandis, sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis meningkatkan usaha-usaha dalam menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara meningkatkan lagi pelayanan dan memberikan kemudahan-kemudahan yang membuat nasabah merasa nyaman dan terkesan atas pelayanan yang mereka rasakan sewaktu berkunjung ke Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, 2002. CV. Toha Putra Semarang. Jakarta.
- Firdaus Rahmat dan Maya Ariyanti, 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta. Bandung.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta.
- Ismail, 2009. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Kasmir, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Grafindo. Jakarta.
- _____, 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- _____, 2006. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muslehuddin, Muhammad, 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nazir, 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Credit Management Handbook*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Siamat, Dahlan, 2003. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Suhardjono, 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono, 2004. *Pengantar Bisnis*. Kencana. Jakarta.
- Surat Edaran, No. S.08-DIR/ADK/03/2010. Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel. Jakarta 04 Maret 2010.
- Suyatno, dkk. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi ke-empat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Undang - Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992

Undang -Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998